KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 9 3 6			H.4 X Final		
DIREKTORAT JENDERAL P		H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 1 4 5 5 7 2 6 9 9 7 2 2 0 0 1							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : LILIEK ANI SURYANINGSIH							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						<u> </u>	
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK F	PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3 21-402-01	.	10.810.000	10.810.000	0	15	1.621.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022							
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah							
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi	:						
C.4 Tanggal C.5 Nama Penandatangan	:	0 8 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy				
nama i onanaatangan	:	RIANDY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	: mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	

JG3F86RO